

WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 71TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BOGOR TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan kedua tahun 2021, maka perlu dilakukan perubahan renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bogor Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I.6 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 59);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); .
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
27. Peraturan Walikota Bogor Nomor 69 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28. Peraturan WaliKota Bogor Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tentang 71 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bogor Tahun 2021.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 57 Seri E) di ubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 4 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 4

(1) Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor Disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang Perubahan;
 - 1.2. Maksud dan Tujuan Perubahan;
 - 1.3. Dasar Hukum Perubahan;
 - 1.4. Sistematika Perubahan;
- b. BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DP3A TAHUN 2021
- c. BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DP3A TAHUN 2021
- d. BAB IV : PENUTUP

(2) Ketentuan dalam Lampiran di ubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 2021

WALIKOTA BOGOR,

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor

Pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

SYARIFAH SOFIAH D

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

TAHUN NOMOR SERI

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TENTANG 71
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BOGOR TAHUN 2021.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) DP3A Kota Bogor Tahun 2021 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2021. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;

- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

DP3A Kota Bogor dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2021 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja DP3A Tahun 2021. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2021, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Renja DP3A Kota Bogor Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil pelaksanaan Renja DP3A Tahun 2021, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor yaitu "Mewujudkan kota bogor yang ramah keluarga". Disamping itu dalam rangka penyesuaian serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kota bogor dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja 2021 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan DP3A Kota Bogor tahun 2021.

1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan

Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja DP3A Kota Bogor Tahun 2021 adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi DP3A Kota Bogor Tahun 2021 dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2021 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2021.

Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja DP3A Kota Bogor Tahun 2021 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan DP3A Kota Bogor sampai dengan triwulan dua tahun 2021.

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2021 dengan dokumen Perubahan Renja DP3A Kota Bogor Tahun 2021.

1.3 Dasar Hukum Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Renja DP3A Kota Bogor Tahun 2021 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan PPRG di daerah;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E).
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D)
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
27. Peraturan Perwali Nomor 173 tahun 2020 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Srtuktural Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
28. Peraturan Walikota Bogor Nomor 69 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29. Peraturan WaliKota Bogor Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021

1.4 Sistematika Perubahan

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Perubahan RKPD

1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan

1.3 Dasar Hukum Perubahan RKPD

1.4 Sistematika Perubahan RKPD

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3A Tahun 2019 sampai dengan Triwulan

II

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja DP3A Tahun

2021

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DP3A TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Renja DP3A Kota Bogor Tahun 2021 sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan melaksanakan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

Dalam pelaksanaan Urusan urusan wajib non pelayanan dasar melaksanakan 6 program dengan anggaran sebesar Rp. 14.529.986.232,- dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan II sebesar Rp. 3.633.369.162,- atau 24%, masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan II disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi anggarannya karena dianggarkan di triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) tetapi secara fisik telah mulai dilaksanakan.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada triwulan III sehingga realisasi program/kegiatan sampai kondisi Juni 2021 masih rendah tetapi secara fisik telah dalam proses pelaksanaan. Adapun Capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor Kota Bogor 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2021		Realisasi capaian kinerja Renstra Kota Bogor s/d Renstra Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renstra Kota Bogor tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2021)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	Penanggung jawab	Ket.
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
1	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14=6+12		15 = 14/5 x 100%	16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	PEMBERDAYAAN , PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																	
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	10,800,178,432			BB	10,800,178,432	Rp 1,431,956,640		Rp 1,541,062,422	2,973,019,062	0.28						
		Nilai Rata- Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3.35				3.35												
	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN																	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2021		Realisasi capaian kinerja Renstra Kota Bogor s/d Renstra Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renstra Kota Bogor tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2021)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	Penanggung jawab	Ket.	
							I	II										
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yg disusun tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan	100%	Rp 4,500,000			100%	Rp 4,500,000	Rp 1,500,000	5 dokumen	Rp 1,500,000	3,000,000	0.67					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	Rp 4,500,000			5 dokumen	Rp 4,500,000	Rp 1,500,000	5 dokumen	Rp 1,500,000	3,000,000	0.67					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan BPK dan inspektorat yang ditindak lanjuti	90%	Rp 6,984,251,440			90%	Rp 6,984,251,440	Rp 1,062,261,585	5 Dokumen	Rp 1,433,797,453	2,496,059,038	0.36					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	33 orang	Rp 6,972,711,440			33 orang	Rp 6,972,711,440	Rp 1,062,261,585	33 orang	Rp 1,433,797,453	2,496,059,038	0.36					
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang melaksanakan tugas ASN	12 orang	Rp 11,540,000			12 orang	Rp 11,540,000				-	-					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2021		Realisasi capaian kinerja Renstra Kota Bogor s/d Renstra Tahun lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renstra Kota Bogor tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2021)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	Penanggung jawab	Ket.	
								I	II									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	Rp 2,666,413,100		100 %	Rp 2,666,413,100		Rp 102,596,373		Rp 48,994,516		151,590,889		0.06			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	Rp 5,999,600		12 bulan	Rp 5,999,600	3		3			-		-			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	Rp 534,284,300		12 bulan	Rp 534,284,300	3		3	Rp 1,920,000		1,920,000		0.00			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	215 unit	Rp 137,321,600		215 unit	Rp 137,321,600				Rp 165,000		165,000		0.00			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah orang yang tersediakan bahan logistik	15,000	Rp 1,428,295,000		15,000	Rp 1,428,295,000		Rp 77,835,000		Rp 39,770,000		117,605,000		0.08			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2021		Realisasi capaian kinerja Renstra Kota Bogor s/d Renstra Tahun lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renstra Kota Bogor tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2021)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	Penanggung jawab	Ket.
								I	II								
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	Rp 11,712,600		100%	Rp 11,712,600					-	-				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	persentase bahan bacaan dan perundang-undanga	100%	Rp 4,200,000		100%	Rp 4,200,000	25	Rp 1,392,000	25	Rp 348,000	1,740,000	0.41				
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu fasilitasi kunjungan tamu	12	Rp 43,950,000		12	Rp 43,950,000	3	Rp 975,000	3		975,000	0.02				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	33 orang	Rp 500,650,000		33 orang	Rp 500,650,000	5	Rp 22,394,373	5	Rp 6,791,516	29,185,889	0.06				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	Rp 700,697,892		100%	Rp 700,697,892	3	Rp 214,515,435	3	Rp 52,680,658	267,196,093	0.38				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Rp 179,400,380		12 bulan	Rp 179,400,380	3	Rp 38,688,051	3	Rp 9,653,534	48,341,585	0.27				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2021		Realisasi capaian kinerja Renstra Kota Bogor s/d Renstra Tahun lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renstra Kota Bogor tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2021)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	Penanggung jawab	Ket.
								I	II								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	Rp 521,297,512		12 bulan	Rp 521,297,512	3	Rp 175,827,384	3	Rp 43,027,124	218,854,508	0.42				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendapat pemeliharaan	100%	Rp 444,316,000		100%	Rp 444,316,000	25	Rp 51,083,247	Rp 25	Rp 4,089,795	55,173,042	0.12				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	100%	Rp 11,660,000		100%	Rp 11,660,000	25	Rp 757,300	25	Rp 614,500	1,371,800	0.12				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	90%	Rp 252,520,000		90%	Rp 252,520,000		Rp 50,325,947		Rp 3,475,295	53,801,242	0.21				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan/rehabilitasi	3 unit	Rp 180,136,000		3 unit	Rp 180,136,000					-	-				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2021		Realisasi capaian kinerja Renstra Kota Bogor s/d Renstra Tahun lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renstra Kota Bogor tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2021)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	Penanggung jawab	Ket.
						I	II								
PROGRAM															
II.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	80	550,681,200		80	550,681,200	Rp 13,472,500	Rp 77,853,700	91,326,200	0.17				
		Persentase Perempuan Berpolitik (%)	22			22									
KEGIATAN															
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program yang dilaksanakan oleh PD yang Responsif Gender	30	Rp 46,730,000		30	Rp 46,730,000	Rp -	Rp 1,100,000	1,100,000	0.02				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan Kebijakan dan Pendampingan PUG dan PPRG	30	Rp 46,730,000		30	Rp 46,730,000		Rp 1,100,000	1,100,000	0.02				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2021		Realisasi capaian kinerja Renstra Kota Bogor s/d Renstra Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renstra Kota Bogor tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2021)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	Penanggung jawab	Ket.	
							I	II									
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan (Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan / Total jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup perempuan x 100%)	50%	Rp 503,951,200			50%	Rp 503,951,200	Rp 13,472,500		Rp 76,753,700	90,226,200	0.18				
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	300	Rp 503,951,200			300	Rp 503,951,200	Rp 13,472,500	100	Rp 76,753,700	90,226,200	0.18				
PROGRAM																	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan %	78	Rp 240,990,000			78	Rp 240,990,000	Rp 21,121,000	2,9	Rp 9,415,000	30,536,000	0.13				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2021		Realisasi capaian kinerja Renstra Kota Bogor s/d Renstra Tahun lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renstra Kota Bogor tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2021)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	Penanggung jawab	Ket.
						I	II								
		Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0.0106			0.0106									
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan	0.0105	Rp 54,050,000		0.0105	Rp 54,050,000	Rp 21,121,000	Rp 9,415,000	30,536,000	0.56				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	20 orang	54,050,000		20 orang	54,050,000	Rp 21,121,000	Rp 9,415,000	30,536,000	0.56				
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan perempuan yang dirujuk ke Layanan Rujukan Lanjutan	10%	186,940,000		10%	186,940,000	-	-	-	-				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2021		Realisasi capaian kinerja Renstra Kota Bogor s/d Renstra Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renstra Kota Bogor tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2021)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	Penanggung jawab	Ket.	
							I	II									
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan bagi perempuan korban yang tertangani	10 kasus	186,940,000			10 kasus	186,940,000				-					
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan Perlindungan perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	55 %	90.000.000			55 %	90.000.000									
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan	100 orang	65.000.000			100 orang	65.000.000									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2021		Realisasi capaian kinerja Renstra Kota Bogor s/d Renstra Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renstra Kota Bogor tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2021)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	Penanggung jawab	Ket.
							I	II										
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan	Jumlah Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus yang tersedia	100 orang	25.000.000			100 orang	25.000.000										
	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																
III.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	74-75 point	2,674,674,400			74-75 point	2,674,674,400	-	75,396,500	-	19,130,000	94,526,500	0.04				
	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN																
1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alumni sekolah ibu yang mendapatkan peningkatan pengetahuan keluarga dalam meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	0 orang	Rp 2,291,392,600			0 orang	Rp 2,291,392,600		Rp 47,919,000		Rp 18,650,000	66,569,000	0.03				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2021		Realisasi capaian kinerja Renstra Kota Bogor s/d Renstra Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renstra Kota Bogor tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2021)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	Penanggung jawab	Ket.
							I	II								
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	1 Kegiatan	Rp 2,291,392,600			1 Kegiatan	Rp 2,291,392,600	Rp 47,919,000	Rp 18,650,000	66,569,000	0.03				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	20%	Rp 383,281,800			20%	Rp 383,281,800	Rp 27,477,500	Rp 480,000	27,957,500	0.07				
	Advokasi Kabijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta 'Advokasi Kabijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga melalui Rakor pokja dan pokjanel posyand	982 orang	Rp 38,846,000			982 orang	Rp 38,846,000			-	-				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2021		Realisasi capaian kinerja Renstra Kota Bogor s/d Renstra Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renstra Kota Bogor tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2021)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	Penanggung jawab	Ket.	
							I	II										
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga melalui pelatihan smartposyandu	300 orang	Rp 124,783,000			300 orang	Rp 124,783,000	Rp 800,000			800,000	0.01					
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga melalui Bintek UP2AK Pelatihan di lokasi lomba/ Pelatihan Keterampilan bagi anggota UP2K /Pelatihan Keterampilan bagi Rumah Tangga Sasaran	260 orang	Rp 219,652,800			260 orang	Rp 219,652,800	Rp 26,677,500		Rp 480,000	27,157,500	0.12					
	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM										-						
IV.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pengelolaan data gender dan anak	80	100,665,000			80	-	Rp 1,300,000			1,300,000	-					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2021		Realisasi capaian kinerja Renstra Kota Bogor s/d Renstra Tahun lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renstra Kota Bogor tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2021)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	Penanggung jawab	Ket.	
						I	II											
	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN																
1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Data gender dan anak	36	Rp 100,665,000		36	Rp 100,665,000	Rp 1,300,000		Rp -		1,300,000	0.01					
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang tersedia	2 dokumen	Rp 70,265,000		2 dokumen	Rp 70,265,000	Rp 1,300,000				1,300,000	0.02					
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang memanfaatkan Data Gender	36 Lembaga	Rp 30,400,000		36 Lembaga	Rp 30,400,000					-	-					
	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2021		Realisasi capaian kinerja Renstra Kota Bogor s/d Renstra Tahun lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renstra Kota Bogor tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2021)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	Penanggung jawab	Ket.
						I	II										
V.	Pemenuhan Hak Anak	Predikat Kota Layak Anak	Nindya	91,233,500		700	91,233,500	Rp 18,144,800	Rp -	Rp -		18,144,800	0.20				
	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN															
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	20%	91,233,500		20%	91,233,500	Rp 18,144,800		Rp -		18,144,800	0.20				
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kualitas Hidup Anak sesuai dengan kewenangan/Meningkatnya Layanan Kualitas Hidup Anak Kewenangan di Kota Bogor	5 layanan	44,312,500		5 layanan	44,312,500	Rp 4,720,800				4,720,800	0.11				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2021		Realisasi capaian kinerja Renstra Kota Bogor s/d Renstra Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renstra Kota Bogor tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2021)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	Penanggung jawab	Ket.	
							I	II									
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak di Tingkat Kota Bogor/Jumlah Layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak di Tingkat Kota Bogor	3 layanan	23,171,500			3 layanan	23,171,500	Rp 6,692,000			6,692,000	0.29				
	Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak/Meningkatnya Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak di Tingkat Kota Bogor	100 orang	23,749,500			100 orang	23,749,500	Rp 6,732,000			6,732,000	0.28				
	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2021		Realisasi capaian kinerja RenstraKota a Bogor s/d Renstra Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renstra Kota Bogor tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2021)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan AnggaranRenstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	Penanggung jawab	Ket.	
			%	Rp	%	Rp	%	Rp	I	II							
VI.	Perlindungan Khusus Anak	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap anak	78%	Rp 832,885,700			78%	Rp 832,885,700	Rp 337,906,000		Rp 117,146,600	455,052,600	0.55				
		Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0.0106														
	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN															
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0.0106	Rp 675,866,200			0.0106	Rp 675,866,200	Rp 336,856,000		Rp 117,146,600	454,002,600	0.67				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2021		Realisasi capaian kinerja Renstra Kota Bogor s/d Renstra Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renstra Kota Bogor tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2021)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	Penanggung jawab	Ket.
							I	II								
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kot	Jumlah Peserta advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak/Meningkatnya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan di Kota Bogor	200 orang	Rp 62,331,200			200 orang	Rp 62,331,200	Rp 9,256,000	Rp 2,398,600	11,654,600	0.19				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan melalui Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak/Rakor Perlindungan Anak/Rapat intern Perlindungan anak terkait kasus yang dilaporkan/pelatihan/Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan di Kota Bogor	1 lembaga	Rp 613,535,000			1 lembaga	Rp 613,535,000	Rp 327,600,000	Rp 114,748,000	442,348,000	0.72				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2021		Realisasi capaian kinerja Renstra Kota Bogor s/d Renstra Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renstra Kota Bogor tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2021)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	Penanggung jawab	Ket.					
							I	II													
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap anak	78%	Rp 157,019,500			78%	Rp 157,019,500	Rp 1,050,000		Rp -	1,050,000	0.01								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak/Meningkatnya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan di Kota Bogor	200 orang	Rp 157,019,500			200 orang	Rp 157,019,500	Rp 1,050,000			1,050,000	0.01								
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								15,050,318,232	28	1,823,900,940		1,764,607,722	-	3,633,369,162	-	0.24	-	-	-	-	-

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DP3A
TAHUN 2021

3.1 Unsur Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor menjalankan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Dengan tambahan Anggaran yang diajukan dalam renja Perubahan Tahun Anggaran 2021 DP3A sebesar Rp. 830.067.600 dengan rincian sub kegiatannya adalah sebagai berikut;

1. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG bertambah sebesar Rp. 52.614.600;
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota sebesar Rp.100.000.000 (penambahan peserta 100 orang);
3. Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan sebesar Rp.64.583.000 (30 orang);
4. Pemberian bantuan khusus kepada perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus Rp. 25.050.000 (100 paket);
5. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota sebesar Rp. 254.398.000 (penambahan 125 peserta);
6. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota sebesar Rp. 138.726.000;
7. Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota sebesar Rp.194.726.000.

Sedangkan pada renja perubahan tahun 2021 akan dilakukan Refokusing pendanaan sebesar Rp. 1.136.280.500 . Dengan Rincian Refokusing anggaran sebagai berikut :

- a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 11.540.000
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 59.809.500
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 341.881.000
- d. Fasilitasi Kunjungan Tamu sebesar Rp. 36.450.000
- e. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 723,050.000 .

Dengan Rincian Perubahan Renja Sebagaimana terlampir dalam lampiran matrik renja.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja DP3A Kota Bogor Tahun 2021 merupakan tindaklanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 yang disusun berdasarkan pada Renstra Perubahan DP3A Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan hasil pelaksanaan Renja DP3A Tahun 2021, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor

Perubahan Renja DP3A Kota Bogor Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan program kegiatan serta sub kegiatan DP3A Kota Bogor Tahun 2021 dalam menjalankan peran dan fungsinya .

Diharapkan Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam mewujudkan Visi yaitu ***“MEWUJUDKAN KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA RAMAH KELUARGA”***.

WALIKOTA BOGOR

BIMA ARYA